



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 7 Januari 2021/Periodik - 2020)

BIDANG : YUDIKATIF
LEMBAGA : MAHKAMAH AGUNG
UNIT KERJA : PENGADILAN TINGGI MANADO

I. DATA PRIBADI

1. Nama : HUMUNTAL PANE
2. Jabatan : WAKIL KETUA
3. NHK : 123746

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN

Rp. 3.818.170.000

1. Tanah Seluas 361 m2 di KOTA BINJAI , HASIL SENDIRI Rp. 80.000.000
2. Tanah Seluas 300 m2 di KOTA PEKANBARU , HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 80 m2/80 m2 di TAPANULI UTARA, WARISAN Rp. 50.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 266 m2/400 m2 di KOTA JAKARTA UTARA , HASIL SENDIRI Rp. 2.600.820.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 50 m2/80 m2 di BEKASI, HASIL SENDIRI Rp. 500.000.000
6. Tanah dan Bangunan Seluas 600 m2/62 m2 di BOGOR, WARISAN Rp. 316.500.000
7. Tanah Seluas 3417 m2 di TAPANULI UTARA, WARISAN Rp. 170.850.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

Rp. 680.000.000

1. MOBIL, TOYOTA AVANZA MINIBUS Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 205.000.000
2. MOBIL, MITSUBISHI PAJERO DAKAR 2X4 Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 475.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA

Rp. 306.225.000

D. SURAT BERHARGA

Rp. 2.000.000

E. KAS DAN SETARA KAS

Rp. 135.702.420

F. HARTA LAINNYA

Rp. ----



Sub Total	Rp.	4.942.097.420
III. HUTANG	Rp.	----
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	4.942.097.420

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.